



BRMP Veteriner Hadiri Lokakarya Konsultasi Hasil Penilaian Risiko PMK

Jakarta Selatan (7/8/25) – Sebagai dasar penyusunan Risk-Based Strategic Plan (RBSP), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menggelar kegiatan Lokakarya Konsultasi Hasil Penilaian Risiko Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dilakukan guna memperkuat strategi pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular strategis di Indonesia. Lokakarya ini bertujuan untuk memaparkan hasil awal penilaian risiko serta menjaring masukan teknis dari berbagai pihak terkait. Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan materi Situasi Global PMK dan Pengenalan PCPFMD, Perkembangan Situasi PMK di Indonesia (Surveilans, Investigasi Wabah, Vaksinasi dan Program Pengendalian Lainnya), serta Pendahuluan dan Tujuan Penilaian Risiko PMK.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BRMP Veteriner) turut hadir dalam kegiatan ini yang diwakili oleh Kepala BRMP Veteriner, Dr. Ir. Fery Fachrudin Munier, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., serta Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian. Keduanya mengikuti rangkaian diskusi aktif yang membahas berbagai aspek risiko PMK, termasuk risiko masuknya strain baru PMK ke Indonesia, risiko penyebaran dari wilayah endemis ke daerah bebas, risiko meningkatnya kembali kasus di daerah endemis, kesenjangan data dan asumsi teknis, dan opsi mitigasi dan strategi komunikasi risiko.

Dalam forum diskusi, perwakilan BBRM Veteriner menyampaikan pandangan teknis terkait pengendalian dan pengobatan PMK. Ditekankan bahwa pengendalian efektif dapat dicapai melalui pemberian vaksin PMK secara rutin dan penyediaan pakan berkualitas dengan nutrisi seimbang yang mampu meningkatkan ketahanan tubuh ternak. Untuk ternak yang terinfeksi, pemberian antibiotik yang tepat dan dukungan pakan bergizi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemulihan.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaboratif antara pemerintah, lembaga teknis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun strategi yang berbasis risiko dan data untuk mendukung keberhasilan program pengendalian PMK secara nasional.

